

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *risālah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khāliqnya*. Islam sangat memperhatikan prinsip sosial dalam setiap transaksi yang disyari'atkan. Hal ini sebagai perwujudan ekonomi Islam tidak berorientasi individual tetapi komunal. Islam tidak menghendaki sebagian orang dapat sejahtera dan sebagian yang lain dalam penderitaan. Islam juga menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat ada perbedaan taraf ekonomi. Oleh karena itu, Islam memiliki prinsip ekonomi tidak hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat memberikan bantuan kepada yang masih membutuhkan bantuan.¹

Mu'āmalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati dalam bukunya Hendi Suhendi, menyatakan bahwa fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah

¹ Mohamad Habiburrahman, dkk, *Mengenal Prgadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais,2012). 100.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka tidak boleh bagi yang penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rāhin*).

Akan tetapi menurut Syafi'iyah penggadai (*rāhin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rāhin* (penggadai) dan bukan untuk *murtahin* (pemegang gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qard* (hutang-piutang).

Menurut ulama Hanabilah mengatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau pemerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai.

Sementara itu, gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yaitu berdasarkan suatu adat kebiasaan yang sudah dianutnya turun-temurun. Dalam istilah ushul fiqh kebiasaan (tradisi) disebut juga dengan *al-'urf*. Pengertian *al-'urf* secara

masih produktif, karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tersebut tidak produktif.

Pada kenyataan yang terjadi di Desa tersebut, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun diambil oleh *murtahin*. Pihak *murtahin* berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut sebelum *rāhin* melunasi hutangnya. Pihak *rāhin* mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin*, walaupun sebenarnya mereka berat hati sawahnyadiambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat *murtahin* mengelola sawah tersebut tanpa rasa canggung. Jika sudah tiba masanya *rāhin* hendak melunasi hutangnya atau hendak menebus kembali sawahnya, sedangkan sawah yang dikelola oleh *murtahin* belum waktunya panen, maka sawah tersebut belum sepenuhnya bisa diserahkan kepada *rāhin*. Kemudian hasil dari panen sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, hanya saja jika pihak *murtahin* berbaik hati maka ia akan membagi sebagian hasil panennya kepada *rāhin*.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tersebut tanpa adanya jangka waktu, jadi *rāhin* bisa kapan saja menebus atau melunasi hutangnya. Dalam hal uang pelunasannya, tidak ada suatu tambahan uang didalamnya. Jadi pihak *rāhin* hanya wajib mengembalikannya sejumlah uang pinjamannya. Hal seperti

hal tersebut, di antara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Estafet Kendaraan Bermotor di Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik". Oleh Mina Rokaya, 2012. Skripsi ini berisi tentang gadai beruntun yang mana *rahin* menggadaikan barangnya kepada *murtahin* dengan potongan 10 persen, kemudian *murtahin* pertama menggadaikan barang tersebut kepada *murtahin* kedua dengan potongan lebih sedikit dibandingkan yang disyaratkan kepada *rāhin*. Dalam skripsi disimpulkan bahwa transaksi gadai estafet yang dilakukan oleh masyarakat tersebut hukumnya haram.¹⁵

Kedua, "Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istinbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai". Oleh Mahmudi, 2009. Skripsi ini berisi tentang metode *istinbat* yang digunakan oleh ulama Hanafiyah mengenai pemanfaatan barang. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa 'ulama Hanafiyah sangat selektif dalam mencari dalil dasar hukum dan ini juga berlaku pada persoalan gadai yang mana 'ulama Hanafiyah metodenya menggunakan *al-Qur'an* dan *hadith*.¹⁶

Ketiga, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang dengan Gadai Sawah di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". Oleh Miftahul Hasanah, 2012. Skripsi ini berisi tentang paktek gadai sawah yang

¹⁵Mina Romaya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Estafet Kendaraan Bermotor di Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik", (Skripsi-- Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 62.

¹⁶ Mahmudi, "Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istinbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gada", (Skripsi-- Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 70.

mana sawah tersebut diambil manfaatnya oleh *murtahin* dan dalam pembayarannya ada penambahan uang dalam tiap bulannya jika *rāhin* tidak bisa membayarnya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuh tersebut tidak sah dan tidak boleh menurut *al-Qur'an* dan *hadith*, *ijmā'* 'ulama.¹⁷

Keempat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Adol Gadai Sawah di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Oleh Khurun In Fitriana, 2012. Skripsi ini berisi tentang adanya batas waktu dalam transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat, dan kesimpulannya dalam skripsi bahwa adanya batas waktu dalam transaksi gadai tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam dipandang dari kemaslahatan umat. Karena dalam Hukum Islam tidak menjelaskan batas waktu gadai secara terperinci.¹⁸

Dari kajian pustaka diatas maka dalam skripsi ini penulis melakukan suatu penelitian yang berbeda, yaitu terletak pada analisis mengenai suatu tradisi yang dipakai dalam melakukan praktek gadai sawah oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

¹⁷ Miftahul Hasanah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang Dengan Gadai Sawah di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi-- Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 70.

¹⁸ Khurun In Fitriana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Adol Gadai Sawah di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi-- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 61.

